

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari peran strategis yang dimainkan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro didefinisikan sebagai entitas produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu terkait kekayaan bersih dan omzet tahunan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur fasilitas, perlindungan, dan penguatan UMKM. Sektor UMKM di Indonesia telah terbukti menjadi pilar utama perekonomian nasional, terutama dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi global. UMKM memainkan peran krusial dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah mencapai jumlah 64 juta unit usaha, berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB), dan menyediakan hampir 97% dari total lapangan kerja (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa UKM memainkan peran penting sebagai penggerak utama perekonomian nasional. UKM tersebar di berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, manufaktur, pertanian, dan lainnya, dengan karakteristik bisnis yang beragam. Mengingat meningkatnya permintaan pasar dan persaingan komersial yang semakin ketat, UKM diharapkan mampu mengelola kegiatan komersialnya secara efektif. Peningkatan kinerja UKM memiliki dampak yang signifikan dan mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena UKM merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak individu dan keluarga (djpb kemenkeu, 2023). Keberhasilan dan ekspansi UKM tidak hanya memengaruhi pemilik bisnis, tetapi juga karyawan dan komunitas sekitarnya. Selain itu, kinerja UKM yang optimal

berkontribusi pada daya saing mereka di pasar, yang dapat meningkatkan peluang bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Azzahra & Wibawa (2021) meskipun UMKM memiliki peranan yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional, upaya untuk meningkatkan kinerja usaha masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah kesulitan dalam evaluasi kinerja secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan sebagian besar pelaku UMKM yang lebih berfokus pada aktivitas operasional harian, sehingga mengabaikan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan usaha mereka.

Meskipun berkembang dengan pesat, dalam praktiknya, tidak sedikit UMKM yang mengalami stagnasi dalam pertumbuhan usahanya. Hal ini sering kali disebabkan oleh lemahnya manajemen internal, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan. Sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan, seperti perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, pengendalian biaya, serta pengelolaan arus kas. Kekurangan manajemen keuangan profesional tidak hanya memengaruhi operasi jangka pendek perusahaan, tetapi juga menjadi hambatan signifikan bagi perluasan bisnis. Ekspansi usaha, yang dimaknai sebagai perluasan kapasitas produksi, penambahan jaringan distribusi, pembukaan cabang baru, ataupun diversifikasi produk dan pasar, merupakan strategi yang umum digunakan pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar.

Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap modal dan pengelolaan keuangan yang belum optimal. Sebagian besar pelaku UMKM mengelola keuangan mereka secara sederhana atau bahkan tidak terpisah antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Hal ini tentu menghambat mereka untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan

keuangan yang lebih strategis, yang sangat penting bagi pengembangan usaha jangka panjang (Tahir et al., 2025). Dalam hal ini, manajemen keuangan yang baik menjadi salah satu faktor kunci untuk mendukung ekspansi usaha yang lebih luas Gifria & Indriani (2023).

Di era digitalisasi saat ini, inklusi *digital finance* atau keuangan digital inklusif telah menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan akses UMKM terhadap layanan keuangan formal. Inklusi *digital finance* merujuk pada tingkat kemampuan individu maupun pelaku usaha dalam mengakses serta memanfaatkan layanan keuangan berbasis digital yang bersifat terjangkau, mudah dioperasikan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsep ini mencakup akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan digital seperti pembayaran elektronik, tabungan digital, kredit online, asuransi digital, dan investasi melalui platform teknologi finansial, Ozili (2023).

Bank Indonesia (2024) mencatat bahwa tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia telah mencapai 68,4% pada tahun 2023, meningkat signifikan dari 51,8% pada tahun 2021. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya penetrasi *smartphone*, perbaikan infrastruktur internet, dan dukungan regulasi pemerintah melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 2021-2025. Platform *fintech* seperti *e-wallet* (GoPay, OVO, DANA), *peer-to-peer lending* (Investree, Amartha), *mobile banking*, dan sistem pembayaran digital lainnya telah memfasilitasi UMKM untuk mengakses modal kerja, melakukan transaksi pembayaran, dan mengelola keuangan secara lebih efisien.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 88,96% pada tahun 2024, meningkat dari 85,1% pada 2022 (Bappeda Jatim, 2024). Namun, tingkat literasi keuangan hanya berada pada angka 55,33%, yang berarti terdapat kesenjangan antara akses terhadap layanan keuangan dan pemahaman dalam menggunakannya secara efektif. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat

bahwa nilai transaksi pembayaran digital pada 2023 mencapai Rp 7.805 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan UMKM sebagai salah satu pengguna terbesar.

Peningkatan ini juga tercermin dari semakin banyaknya UMKM yang memanfaatkan layanan *fintech lending*, *mobile banking*, dan dompet digital untuk mendukung aktivitas usaha mereka. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti bahwa masih ada tantangan berupa rendahnya literasi *digital* di sebagian pelaku UMKM, isu keamanan transaksi, serta keterbatasan edukasi keuangan berbasis teknologi. Fenomena ini menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan inklusi *digital finance* untuk mendorong ekspansi usaha sangat bergantung pada kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan secara efektif dan memanfaatkan teknologi keuangan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap layanan keuangan digital semakin luas, keberhasilan UMKM dalam memanfaatkannya untuk ekspansi usaha sangat bergantung pada kemampuan manajemen keuangan yang baik. Keunggulan inklusi *digital finance* bagi UMKM antara lain: pertama, kemudahan akses tanpa persyaratan administratif yang rumit seperti pada lembaga keuangan konvensional; kedua, kecepatan proses transaksi dan pencairan dana yang dapat dilakukan secara real-time; ketiga, biaya transaksi yang relatif lebih rendah dibandingkan layanan perbankan tradisional; keempat, transparansi dan kemudahan dalam pelacakan riwayat transaksi; dan kelima, fleksibilitas dalam penggunaan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui perangkat *mobile* (Senyo & Osabutey, 2020). Namun demikian, adopsi inklusi *digital finance* oleh UMKM masih menghadapi beberapa tantangan.

Di tingkat regional, Provinsi Jawa Timur telah mencatat kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan—dengan indeks inklusi mencapai 92,99% pada 2022, melampaui target nasional, namun literasi keuangan masih berada

di angka 55,32%, menunjukkan kesenjangan antara akses dan pemahaman. Digitalisasi layanan keuangan juga berkembang pesat; hingga pertengahan 2024, ada sekitar 3,73 juta merchant di Jawa Timur (63% di antaranya adalah UMKM mikro) yang bertransaksi melalui QRIS, dengan total transaksi mencapai Rp 22,6 triliun dan 7,1 juta pengguna. Selain itu, inisiatif edukasi digital seperti program “Cerdig” untuk UMKM pesantren, serta kampanye edukasi digital seperti “Sinau Digital” di Surabaya, mempertegas bahwa akses ke layanan digital saja tidak cukup—UMKM memerlukan pengelolaan keuangan dan literasi teknologi yang memadai agar digital finance dapat betul-betul menjadi katalis ekspansi usaha.

Penelitian Wardani dan Susilo (2022) menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur teknologi, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan resistensi terhadap perubahan teknologi menjadi hambatan utama dalam peningkatan inklusi *digital finance*. Selain itu, gap generasi antara pelaku UMKM yang lebih tua dengan teknologi digital juga menjadi faktor penghambat adopsi layanan keuangan digital. Pentingnya pengelolaan keuangan yang baik serta tingkat inklusi *digital finance* yang sehat menjadi semakin krusial di tengah ketatnya persaingan usaha. UMKM yang mampu mengelola keuangannya secara efektif dan memanfaatkan layanan keuangan digital secara optimal diyakini memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan melakukan ekspansi usaha. Integrasi antara praktik manajemen keuangan tradisional dengan pemanfaatan teknologi keuangan digital diharapkan dapat menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan dan ekspansi UMKM secara berkelanjutan.

Di tingkat daerah, eksistensi UMKM juga memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian lokal, mengurangi pengangguran, serta menciptakan pemerataan pendapatan. Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan dan pusat perdagangan di Indonesia, menunjukkan perkembangan UMKM yang cukup pesat. Salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan UMKM yang signifikan adalah Kelurahan

Kemayoran. UMKM di wilayah ini tersebar dalam berbagai sektor seperti perdagangan eceran, jasa, kuliner, dan industri kreatif. Perkembangan ini mencerminkan potensi besar yang dapat digali dan dikembangkan melalui pendekatan manajerial yang tepat.

UMKM di Kota Surabaya tersebar di berbagai kelurahan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa kelurahan telah berupaya membangun portal UMKM secara daring, seperti Pakis, Wonorejo, Bulak, dan Kemayoran. Keempat kelurahan ini sama-sama memiliki data UMKM yang dapat diakses masyarakat luas, namun terdapat perbedaan mendasar dalam dinamika perkembangannya. Di Kelurahan Pakis, UMKM relatif lebih fokus pada kuliner dan jasa rumah tangga dengan tingkat pemasaran digital yang mulai meningkat. Kelurahan Wonorejo menonjol dengan potensi UMKM berbasis pariwisata dan ekowisata karena lokasi geografisnya, sehingga banyak pelaku usaha yang sudah memanfaatkan platform digital sebagai sarana promosi.

Kelurahan Bulak, dengan dukungan pemerintah kecamatan, berhasil menampilkan data UMKM yang terintegrasi melalui portal SI BADAK, sehingga akses informasi bagi konsumen dan calon mitra menjadi lebih terbuka. Sementara itu, Kelurahan Kemayoran memiliki karakteristik yang berbeda. Walaupun sudah memiliki portal UMKM yang menampilkan produk dan profil usaha, sebagian besar pelaku UMKM di Kemayoran masih menghadapi hambatan serius dalam manajemen keuangan maupun pemanfaatan digital finance. Hal ini tampak pada kasus UMKM lokal seperti Gaulcraft yang masih kesulitan menembus pasar digital dan memperluas jangkauan pemasaran, terutama pasca-pandemi COVID-19. (Wida, 2025)

Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara dukungan fasilitas digital yang sudah tersedia dengan kemampuan pelaku UMKM untuk benar-benar menggunakannya dalam rangka ekspansi usaha. Berbeda dengan Pakis, Wonorejo, maupun Bulak yang sudah lebih aktif dalam pemanfaatan

teknologi digital, UMKM di Kemayoran justru menarik untuk diteliti karena potensi ekspansi yang besar belum sepenuhnya termanfaatkan. Di sisi lain, keterbatasan dalam praktik manajemen keuangan menjadikan ekspansi usaha masih terhambat meskipun akses digital sudah ada. Oleh sebab itu, penelitian ini memilih Kelurahan Kemayoran sebagai lokasi penelitian untuk menyoroti peran manajemen keuangan dan inklusi digital finance dalam mendorong ekspansi UMKM.

Table 1.1 Jumlah UMKM di Kelurahan Kemayoran Kota Surabaya

Tahun	Jumlah UMKM	Sumber Data
2023	200	Kelurahan Kemayoran Kota Surabaya
2024	229	Kelurahan Kemayoran Kota Surabaya

Sumber: Kelurahan Kemayoran Kota Surabaya

Berdasarkan data dari Kelurahan Kemayoran Kota Surabaya, terlihat bahwa jumlah UMKM di Kelurahan Kemayoran mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke 2024. Jumlah UMKM di Kelurahan Kemayoran mengalami kenaikan sebesar 14,5% atau bertambah 29 unit UMKM dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa UMKM di Kelurahan Kemayoran berkembang dengan pesat dan memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh.

Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Mali (2023) menemukan bahwa inklusi keuangan dan penggunaan *digital finance* mempermudah akses UMKM dalam memaksimalkan kinerja usahanya, seperti melakukan transaksi, akses permodalan, bahkan membantu manajerial usahanya. Sejalan dengan itu, Djafar, Mahdalena, dan Wuryandini (2025) menunjukkan bahwa secara parsial, literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. Namun demikian, hasil penelitian Habert dan Arifin (2025) menunjukkan hasil yang kontradiktif, inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Penelitian Daud et al. (2022) juga menemukan

bahwa keuangan digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Didukung oleh penelitian (Khair et al., 2025) membuktikan bahwa manajemen keuangan berpengaruh positif terhadap ekspansi UMKM. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Tangga et al., (2023) yang menunjukkan bahwa manajemen keuangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pelaku UMKM.

Kelurahan Kemayoran dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki karakteristik UMKM yang beragam, mulai dari usaha perdagangan, jasa, hingga industri kecil dengan tingkat adopsi teknologi digital yang bervariasi. Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kombinasi antara praktik manajemen keuangan yang baik dengan pemanfaatan layanan keuangan digital dapat mempengaruhi kemampuan ekspansi UMKM. Ekspansi usaha dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai upaya perluasan skala bisnis yang meliputi peningkatan volume produksi, perluasan wilayah pemasaran, diversifikasi produk, dan penambahan tenaga kerja.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ekspansi usaha UMKM. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian berjudul “Pengaruh Manajemen Keuangan dan Inklusi *Digital finance* Terhadap Ekspansi Usaha Kecil Mikro dan Menengah Di Kota Surabaya Kelurahan Kemayoran”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekspansi UMKM dalam era digitalisasi, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan UMKM di tingkat lokal.

1.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat fenomena yang mengindikasikan bahwa banyak UMKM di Kelurahan Kemayoran yang belum optimal dalam mengelola keuangan dan

memiliki , yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk melakukan ekspansi usaha. Beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah manajemen keuangan berpengaruh terhadap ekspansi usaha UMKM di Kelurahan Kemayoran, Surabaya?
2. Apakah inklusi *digital finance* berpengaruh terhadap kemampuan UMKM untuk melakukan ekspansi usaha di Kelurahan Kemayoran, Surabaya?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh manajemen keuangan dan inklusi *digital finance* terhadap ekspansi usaha UMKM di Kelurahan Kemayoran, Surabaya. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen keuangan terhadap ekspansi usaha UMKM di Kelurahan Kemayoran, Surabaya
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inklusi *digital finance* terhadap kemampuan UMKM dalam melakukan ekspansi usaha di Kelurahan Kemayoran, Surabaya.

1.3. Manfaat penelitian

1.3.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hubungan antara manajemen keuangan dan ekspansi usaha UMKM.
2. Menambah wawasan tentang pengaruh inklusi *digital finance* terhadap ekspansi usaha di sektor UMKM.
3. Memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekspansi usaha UMKM

1.3.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah: Dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang mendukung UMKM dalam pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan.
2. Bagi Pelaku UMKM: Memberikan panduan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan keuangan digital agar dapat berekspansi dengan lebih efektif.
3. Bagi Lembaga Keuangan: Menyesuaikan kriteria pembiayaan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung UMKM yang berpotensi berkembang.
4. Bagi Akademisi: Memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai pengembangan UMKM di berbagai konteks.
5. Bagi Masyarakat: Menyediakan contoh dan pemahaman tentang pentingnya manajemen keuangan yang baik untuk perekonomian lokal.